



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



**Biro Perekonomian
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025**

LAPORAN KINERJA 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan disusun sebagai bentuk *self assessment* atas kinerja organisasi dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus juga sebagai sarana pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target kinerja. Kinerja, Biro Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Tengah diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan kinerja ini juga merupakan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak terkait mengenai Tugas dan Fungsi Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Sulawesi Tengah, serta capaiannya dalam Tahun Anggaran 2025, sehingga diperoleh umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan segala upaya dalam mewujudkan capaian kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi, perencanaan, serta pegabihan kebijakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Palu, 02 Januari 2026

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULTENG



YUNIARTO PASMAN, SH

Pembina Utama Muda

Nip.19720614 200312 1 009

DAFTAR ISI

1. KATA PENGANTAR.....	1
2. DAFTAR ISI	2
3. RINGKASAN EKSEKUTIF.....	4
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 GAMBARAN UMUM.....	6
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	10
1.3 ISU-ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN.....	22
1.4 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2024	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
2.1 RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....	25
2.2 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN.....	26
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	28
2.4 PERJANJIAN KINERJA	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 CAPAIAN KINERJA	30
a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun ini.....	30
b. Membandingkan Antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	31
c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	32
d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/ Daerah Lain jika ada).....	34
e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	35

f. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya.....	44
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	45
3.2 REALISASI ANGGARAN	48
3.3 INOVASI.....	50
3.4 PENGHARGAAN.....	50
BAB IV PENUTUP	51
LAMPIRAN	52
Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2025	

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban praktek kepemimpinan yang baik (*Good Governance*), Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, pada Misi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal, Laporan Kinerja ini menyajikan informasi tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, pencapaian sasaran dalam tahun 2025, laporan kinerja ini sebagai Pertanggungjawaban Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah atas pelaksanaan tugas selama tahun 2025.

Tugas Biro Perekonomian membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, untuk pencapaian target Biro Perekonomian mendapatkan alokasi anggaran pagu awal Rp. 2.809.999.800,- alokasi tersebut menurun dari total pagu tahun sebelumnya dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Anggaran Biro Perekonomian sampai dengan perubahan akhir dokumen anggaran menjadi Rp 2.458.785.250,- alokasi dana tersebut sepenuhnya digunakan untuk peningkatan program penunjang urusan pemerintah daerah dan program perekonomian dan pembangunan.

Dalam perjalanan pelaksanaan anggaran tahun 2025, penyerapan anggaran Biro Perekonomian Setda Prov. Sulteng menunjukkan hasil yang baik yaitu 97,68%, dengan penyerapan tahun sebelumnya sebesar 95,02%, pencapaian tersebut tentunya tidak terlepas dari seluruh pihak yang terlibat dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang ada pada Biro Perekonomian Setda Prov. Sulteng baik pihak internal maupun eksternal. Laporan Kinerja Biro Perekonomian tahun 2025 menyajikan capaian dari pelaksanaan 2 Program, 6 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan menggunakan Anggaran bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Capaian yang ditergetkan pada tahun 2025 sebagian besar terlaksana 100% terhadap ketetapan yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja maupun target yang ada direncana STRATEGIS (Renstra) Sekretariat Daerah Prov. Sulteng. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tetap memacu pelaksanaan Pekerjaan agar terlaksana lebih efisien dan lebih efektif untuk tahun-tahun berikutnya agar dapat mencapai target. Mengacu kepada Peraturan Menteri PAN RB No.88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Biro Perekonomian juga memberikan perhatian terhadap pemanfaatan laporan kinerja, aspek-aspek yang menjadi penekananan yaitu perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai atas laporan kinerja serta bagaimana informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas, sehingga kedepannya Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) ini menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan dapat dijadikan dasar peningkatan kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Laporan Kinerja Biro Perekonomian disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian selama satu tahun anggaran. Laporan ini merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan sasaran, indikator, dan target yang telah ditetapkan.

Biro Perekonomian memiliki peran strategis dalam membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Dalam menjalankan tugasnya, Biro Perekonomian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan pimpinan instansi.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi SAKIP guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi pencapaian target kinerja, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja telah tercapai.

2. Melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan Pertanggungjawaban Keuangan.
3. Sebagai bahan Informasi, Evaluasi dan Dokumentasi referensi dalam perencanaan serta pelaporan pada periode berikutnya.

Dukungan SDM , Sarana dan Prasarana

Sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut Dalam melaksanakan tugas fungsinya di dukung oleh sumber daya manusia :

- a. Menurut Jabatan/ Eselon/JFU

Jabatan	Jenis Kelamin		Total
	Pria	Wanita	
Eselon II	1	0	1
Eselon III	1	2	3
Eselon IV	4	5	9
Pelaksana	10	14	24
PPPK	1	2	3
PPPK PW	2	3	5
Fungsional	2	0	2
Total	22	25	47

- b. Kepangkatan Pegawai pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Golongan/Kepangkatan	Jenis Kelamin		Total
	Pria	Wanita	
II/a	-	-	-
II/b	1	-	1
II/c	1	-	1
II/d	-	-	-
III/a	1	2	3
III/b	4	-	4
III/c	-	4	4
III/d	6	8	14
IV/a	4	4	8
IV/b	-	-	-
IV/c	1	-	1
Total	18	18	36

- c. Tingkat Pendidikan Pegawai pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
	Pria	Wanita	
SLTA/Sederajat	3	1	4
D3	-	-	0
S1	9	9	18
S2	6	8	14
S3	-	-	0
Total	18	18	36

- d. Dukungan Sarana Prasarana

No Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5
1	Kendaraan Roda 4	Inova, Rush	5 Unit	Baik
2	Kendaraan Roda 2	Honda, Yamaha, Suzuki	20 Unit	Baik
3	Komputer	Hp, Lenovo, Asus	12 Unit	Baik
4	Laptop	Asus, Lenovo, Dell, Acer, Hp	19 unit	Baik
5	Infokus/Proyektor	Benq, Viewsonic	2 unit	Baik
6	Printer	Epson	17 Unit	Baik
7	Ac	Sharp, Panasonic	19 Unit	Baik
8	Tablet	Samsung	1 Unit	Baik
9	Kamera	Canon	2 unit	Baik
10	Tv	Lg	2 unit	Baik
11	Filing Kabinet	Frontline, Brother	10 Unit	Baik
12	Lemari Arsip	Frontline, Kayu Kaca	18 Unit	Baik
13	Dispenser	Polytron	2 unit	Baik
14	Kulkas	Polytron	2 unit	Baik
15	Hardisck	Toshiba	3 Unit	Baik

Laporan Kinerja (LKj) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2025

16	Kursi Lipat	Brother, Chitose	28 Unit	Baik
17	Kursi Rapat	Indachi	20 Unit	Baik
18	Kursi Putar staf	Besi	15 Unit	Baik
19	Kursi Pejabat	Indachi, Pira	13 Unit	Baik
20	Meja Kerja/Rapat HPL	Kayu	9 Unit	Baik
21	Meja Kerja Pejabat	Kayu Kaca	13 Unit	Baik
22	Meja Staf	Kayu	20 Unit	Baik

1.2 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah

Dalam menjalankan tugas tersebut Kepala Biro Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pengkoordinasian perumusan, pelaksanaan, supervisi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, serta Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan, supervisi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan daerah pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, serta Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, serta Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, serta Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, serta Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah
- f. pelaporan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, serta Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Untuk menjalankan fungsinya dibantu oleh bagian yaitu :

1. Bagian Kebijakan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Kebijakan Perekonomian mempunyai fungsi mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan pengkoordinasian perencanaan, perumusan kebijakan daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha;

- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha;
- e. penyiapan bahan pelaporan supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha;
- f. penyiapan bahan promosi dan koordinasi kerjasama antar lembaga terkait; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Perekonomian yang berkaitan dengan tugasnya

Uraian tugas Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun perencanaan kegiatan Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan, pembinaan, pelaksanaan, supervisi, fasilitasi kebijakan di bidang analisis ekonomi makro
- c. menyusun laporan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang analisis ekonomi makro;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis ekonomi makro;
- e. menyiapkan bahan promosi dan koordinasi kerjasama antar lembaga terkait;
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan

Uraian tugas Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun perencanaan kegiatan Sub Bagian Analis Ekonomi Mikro;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan, pembinaan, pelaksanaan, supervisi, fasilitasi kebijakan di bidang analis ekonomi mikro;
- c. menyusun laporan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang analisis ekonomi mikro;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis ekonomi mikro;
- e. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian Analis Ekonomi Mikro; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- d. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Biro;
- f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan ANJAB, SOP, RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIP, TAPKIN, LKIP, LKPI, dan LPPD lingkup Biro;
- g. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Biro;
- h. melaksanakan pengadaan barang dan jasa lingkup biro;
- i. melaksanakan perencanaan pemeliharaan kendaraan dan perlengkapan Biro;
- j. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- k. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

2. Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air;
 - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi perizinan pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Perekonomian yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian tugas Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun perencanaan kegiatan Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan, pembinaan, pelaksanaan, supervisi, fasilitasi kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
- c. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
- d. melaksanakan penyusunan analisis kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
- f. melaksanakan fasilitasi kebijakan perizinan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi kebijakan bidang sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian Sumber Daya Alam, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan.

Uraian tugas Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun perencanaan kegiatan Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup;

- b. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan, pembinaan, pelaksanaan, supervisi, fasilitasi kebijakan di bidang sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup;
- c. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup;
- d. melaksanakan penyusunan analisis kebijakan di bidang sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup;
- f. melaksanakan fasilitasi kebijakan perizinan di bidang sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup;
- g. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi kebijakan bidang sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian Sumber Daya Pertambangan dan Lingkungan Hidup; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan

Uraian tugas Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun perencanaan kegiatan Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan, pembinaan, pelaksanaan, supervisi, fasilitasi kebijakan di bidang sumber daya energi dan air;
- c. melaksanakan pengoordinasian kebijakan teknis sumber daya alam energi dan air;
- d. melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksanaan kebijakan teknis sumber daya alam energi dan air;

- e. melaksanakan analisis sumber daya alam energi dan air daya mineral;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi sumber daya alam energi dan air;
 - g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan sumber daya alam energi dan air;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi kebijakan bidang sumber daya alam energi dan air;
 - i. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan
3. Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang badan usaha milik daerah, jasa keuangan dan aneka usaha, badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi, badan layanan umum daerah. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang badan usaha milik daerah jasa keuangan dan aneka usaha, badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi, badan layanan umum daerah;
 - b. penyiapan bahan pengkoordinasian, pembinaan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang badan usaha milik daerah jasa keuangan dan aneka usaha, badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi, badan layanan umum daerah;

- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang badan usaha milik daerah, jasa keuangan dan aneka usaha, badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi, badan layanan umum daerah;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang badan usaha milik daerah, jasa keuangan dan aneka usaha, badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi, badan layanan umum daerah;
- e. penyiapan bahan pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang badan usaha milik daerah, jasa keuangan dan aneka usaha, badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi, badan layanan umum daerah;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Perekonomian yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian tugas Sub Bagian Usaha Milik Daerah Jasa, Keuangan dan Aneka Usaha meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun perencanaan kegiatan Sub Bagian Usaha Milik Daerah, Jasa Keuangan dan Aneka Usaha;
- b. melaksanakan pengoordinasian dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan badan usaha milik daerah jasa keuangan dan aneka usaha;
- c. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas badan usaha milik jasa keuangan dan aneka usaha;
- d. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha

- e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan bidang jasa keuangan dan aneka usaha;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah, Jasa Keuangan dan Aneka Usaha; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan

Uraian tugas Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun perencanaan kegiatan Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
- b. melaksanakan pengoordinasian dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi;
- c. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
- d. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang air minum, limbah dan sanitasi;
- e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi;

- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan bidang air minum, limbah dan sanitasi;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan

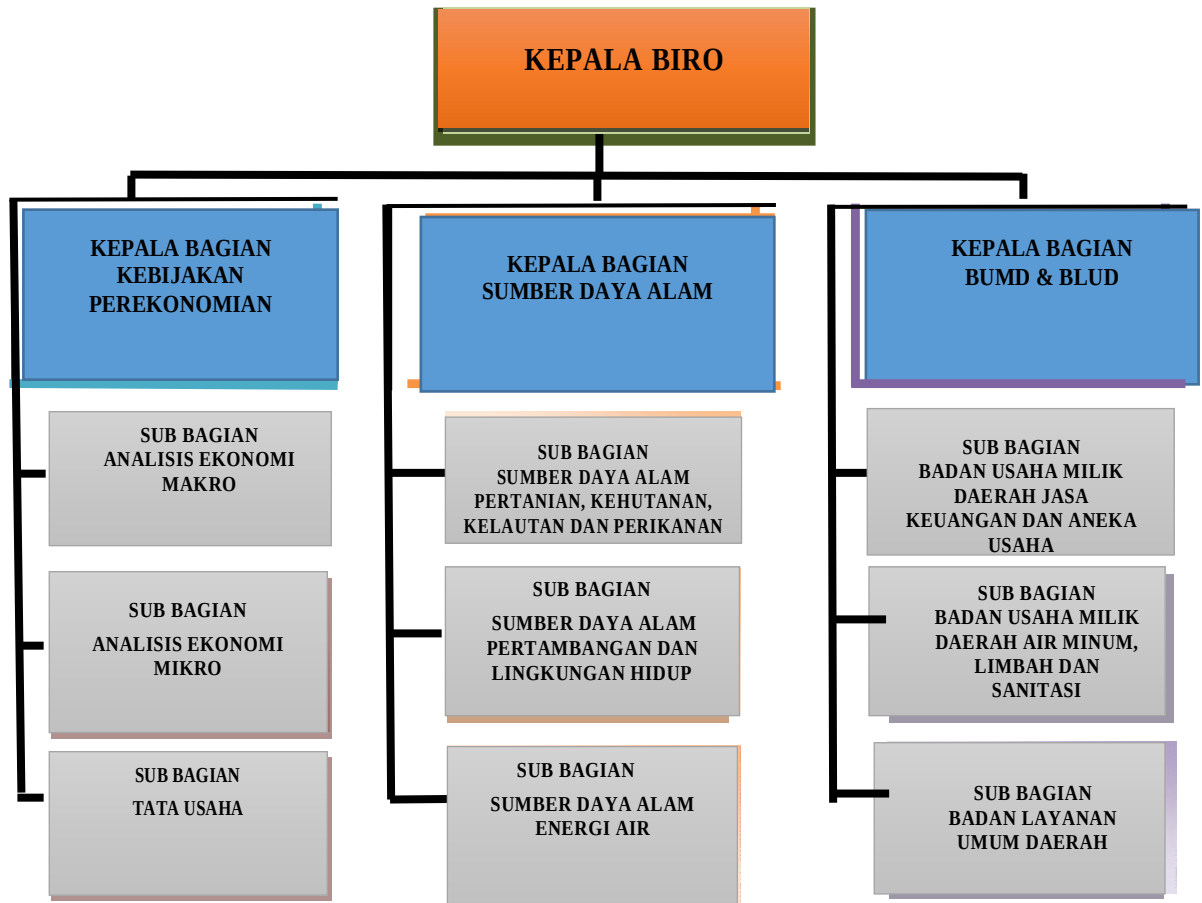
Uraian tugas Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun perencanaan kegiatan Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah;
- b. melaksanakan pengoordinasian dan menyiapkan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan badan layanan umum daerah;
- c. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah;
- d. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah;
- e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Biro, untuk dapat menjalankan tugasnya dibantu 3 (tiga) Kepala Bagian dengan 8 (Delapan) Kepala Sub Bagian. Susunan Organisasi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut

1. Kepala Biro
2. Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian, membawahi :
 - a. Kasub. Bagian Analisis Ekonomi Makro.
 - b. Kasub. Bagian Analisis Ekonomi Mikro.
 - c. Kasub. Bagian Tata Usaha.
3. Kepala Bagian Sumber Daya Alam, membawahi :
 - a. Kasub. Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
 - b. Kasub. Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan Dan Lingkungan Hidup.
 - c. Kasub. Bagian Sumber Daya Alam Energi Air
4. Kepala Bagian BUMD dan BLUD, membawahi :
 - a. Kasub. Bagian Badan Usaha Milik Daerah Jasa keuangan Dan Aneka Usaha.
 - b. Kasub. Bagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Limbah Dan Sanitasi.
 - c. Kasub. Bagian Badan Layanan Umum Daerah.

BAGAN 1.1
STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



a. Isu-Isu Strategis

Isu strategis pembangunan dibidang perekonomian menjadi bagian penting di dalam perencanaan pembangunan. Isu strategis dalam hal ini dibangun pada beberapa sektor pembangunan, meliputi sektor industri dan perdagangan, akses keuangan daerah, koperasi dan UMKM, pertambangan dan lingkungan hidup, pertanian dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi. Oleh karena itu, Biro Perekonomian melakukan analisis terhadap isu-isu strategis agar dapat menghasilkan rumusan kebijakan strategis dalam mendukung pertumbuhan

ekonomi yang inklusif melalui percepatan berusaha, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan wilayah menuju masyarakat mandiri, adil, maju dan sejahtera. Program prioritas yang menjadi pendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian adalah Program Perekonomian dan Pembangunan Daerah yang meliputi fasilitasi kebijakan ekonomi makro dan ekonomi mikro, pengelolaan kebijakan sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah. Program prioritas tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang terpadu yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian ataupun bersama instansi lainnya maupun dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menghasilkan bahan rumusan kebijakan bidang perekonomian untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas, serta peningkatan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Publik dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Biro Perekonomian.

1.4 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2024

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategis instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun dalam hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor : 700.1.2.7/093/LHPAKIP/PROV/IRBAN3/2025 tanggal 27 JULI 2025, terdapat 4 (Empat) penjelasan/pemaparan yang menjadi perhatian, yaitu meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, Dalam hal ini laporan

hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dalam Format Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

No	Rekomendasi LHE	Tindak Lanjut	Link data tindak lanjut
1.	Menyelaraskan kembali beserta formulasi perhitungan IKU, sasaran IKU, PK dan LkjIP yang disesuaikan dengan Rensta.	Berita Acara perubahan sasaran/indikator IKU pada PK dan LKJIP sesuai hasil rapat dengan BAPPEDA	https://drive.google.com/file/d/1-ogcnfqPumzHXZBpnBVuaUzoUQ6Ydinw/view?usp=sharing
2.	Memastikan dalam laporan kinerja bahan sumber data yang digunakan harus jelas	Defenisi Operasional dalam Laporan Kinerja.	https://drive.google.com/file/d/1TMeAI-WzJabvyX_-Q3Ngl0H8BKB9VO3J/view?usp=sharing
3.	Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran capain kinerja.	Bukti Scrennshoot penginputan/Pengaplotan capaian kinerja pada Aplikasi Saliara	https://drive.google.com/file/d/1OtM6oM4iIQnOcfaPvsVjCee0zDulP5Pz/view?usp=sharig
4.	Memberikan informasi tentang keterlibatan pimpinan dalam pengambilan keputusan strategi yang didukung dengan data dukung yaitu daftar hadir, notulensi, dokumentasi dan Berita.	Ditindaklanjuti dengan dokumentasi, daftar hadir, notulensi dan berita acara yang melibatkan pimpinan	https://drive.google.com/file/d/1SMG0G0S9ZOaGoxsvSVav4JmkIVmeDbnf/view?usp=sharing
5.	Melakukan pemantauan atas capaian kinerja secara berjenjang	Ditindaklanjuti dengan dokumentasi, daftar hadir, notulensi dan berita acara (Poin 4 dan 5 Sama)	https://drive.google.com/file/d/1SMG0G0S9ZOaGoxsvSVav4JmkIVmeDbnf/view?usp=sharing
6.	Mendokumentasikan kegiatan monitoring setiap triwulan untuk dapat melihat capaian kinerja secara berkala melalui Berita Acara, daftar hadir, notulensi dan dokumentasi	Ditindaklanjuti dengan dokumentasi, daftar hadir, notulensi dan Berita Acara pada saat rapat monev setiap triwulannya (Poin 4, 5 dan 6 Sama)	https://drive.google.com/file/d/1SMG0G0S9ZOaGoxsvSVav4JmkIVmeDbnf/view?usp=sharing
7.	Menindaklanjuti hasil	Link data Bukti Tindak Lanjut	

	evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan membuat Berita Acara Hasil Tindak Lanjut hasil rekomendasi LHE APIP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	dan Berita Acara	
--	---	------------------	--

Selain Tindak Lanjut tersebut, Biro Perekonomian juga terus melakukan upaya perbaikan dengan Dokumen Perencanaan, Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja, Penguatan Evaluasi Kinerja Internal, serta Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengukuran dan Evaluasi Kinerja.

Secara Keseluruhan, tindak lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 telah dan akan terus dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan Kualitas implementasi SAKIP serta mendorong terwujudnya Akuntabilitas Kinerja yang lebih Efektif, Efisien dan Berorientasi hasil pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 sesuai VISI Gubernur Sulawesi Tengah **“Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029”** Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, pada Misi 4 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal.

Adapun Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas pada Program Biro Perekonomian dalam Rencana Aksi yang merupakan Sasaran Strategis dalam Renstra Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah diturunkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian. Sasaran tersebut adalah Meningkatnya Kualitas Tata kelola kebijakan perekonomian yang ditandai dengan :

Perumusan Tujuan dan Sasaran dan Indikator adalah upaya untuk mencapai visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah. Adapun tujuan, sasaran dan indikator sebagai berikut:

TUJUAN :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas.

SASARAN :

1. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Keuangan dan BUMD
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Biro Perekonomian.

INDIKATOR KINERJA

1. Indeks Kualitas Kebijakan Perekonomian
2. Indek Pelayanan Publik
3. Persentase Inklusi Keuangan
4. Persentase Return on Aset (ROA)
5. Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Perekonomian

2.2. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan Strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, langkah operasional harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Perekonomian. Dalam mendukung pencapaian tujuan, sasaran, serta pagu pendanaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Struktur Program, kegiatan dan Sub Kegiatan terkait pencapaian sasaran Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.609.971.400	1.444.385.400	165.586.000
	<i>Bagian Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</i>	597.471.700	332.217.100,00	265.254.600
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	366.221.950	195.813.350	170.408.600
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	231.249.750	136.403.750	94.846.000
2	<i>Bagian Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</i>	543.749.850	335.164.800	208.585.050
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	156.250.000	112.175.100	44.074.900
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	231.250.150	134.730.050	96.520.100

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	156.249.700	88.259.650	67.990.050
3	<i>Bagian Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</i>	468.749.850	777.003.500	308.253.650
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	171.249.850	583.158.850	411.909.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	171.249.700	99.636.000	71.613.700
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	126.250.300	94.208.650	32.041.650

Tabel 2.2 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.200.028.400	1.014.399.850,00	185.628.550
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.070.000	28.830.000	10.240.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39.070.000	28.830.000	10.240.000
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	324.316.000	230.423.300	93.892.700
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	324.316.000	230.423.300	93.892.700

3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	836.642.400	755.146.550	81.495.850
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	836.642.400	755.146.550	81.495.850

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka memujudkan tujuan, sasaran dan indicator kinerja agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai dan rasional yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun ke depan, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel. 2.3.a
Mstriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021 -2026
T

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:				
				2022	2023	2024	2025	2026
Tercapainya peningkatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan implementasi kebijakan perekonomian	Meningkatnya perumusan dan koordinasi,fasilitasi,pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian daerah	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi kebijakan perekonomian daerah	Persen	100	100	100	100	100
		Inflasi	Persen	1,52	1,91	2,18	2,71	2,58

Tabel. 2.3.a
Mstriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 -2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Keuangan dan BUMD	Inklusi Keuangan (%)	Persen	85,05	85,83	86,61	87,38	88,16	89
		Return on Asrt (ROA) BUMD (%)	Persen	2,26	2,24	2,58	2,74	2,9	3,06
	Meningkatnya Kualitas tata Kelola Kebijakan	Indeks Kualitas Pekerjaan	Persen	55	58	60	62	65	67

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan atas pencapaian kinerja untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Selain itu, perjanjian kinerja juga merupakan dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Adapun Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.4
Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian

No	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya kualitas kebijakan strategis penanganan inflasi	Sub Komponen Strategis Pelaksanaan RB Tematik Inflasi	100%
2.	Meningkatnya Return On Aset (ROA) BUMD	(Return On Aset (ROA) BUMD)	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Biro Perekonomian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90

Tabel. 2.4.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Biro Perekonomian

No	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian	Nilai Kualitas Kebijakan bidang ekonomi	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Biro Perekonomian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85

Pada tabel diatas dapat kita lihat penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Awal, indikator sub-komponen strategis pelaksanaan RB Tematik Inflasi dicantumkan sebagai bentuk respons cepat terhadap arahan nasional. Saat itu, pengendalian inflasi merupakan prioritas utama yang

bersifat mendesak (top-down mandate), sehingga setiap instansi diharapkan berkontribusi langsung dalam menjaga stabilitas harga melalui indikator yang spesifik, namun pada Perjanjian Kinerja Akhir (PK) Dasar Pertimbangan Penghapusan indikator tersebut pada Perjanjian Kinerja Akhir dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan penajaman sasaran strategis, dengan poin-poin utama sebagai berikut:

Penyelarasan Fokus Berdasarkan hasil asistensi dan evaluasi DESK dari Bappeda Provinsi , dilakukan simplifikasi agar indikator RB Tematik lebih fokus pada tugas dan fungsi (tusi) utama instansi yang memberikan dampak paling signifikan..

Prinsip Efektivitas: Indikator tersebut dinilai telah tercapai atau beralih menjadi aktivitas rutin yang mekanismenya sudah mapan, sehingga pada PK Akhir, memilih untuk memprioritaskan indikator lain yang memiliki daya ungkit (leverage) lebih besar terhadap reformasi birokrasi di level internal.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada pemangku kepentingan, sebagaimana diamanatkan dalam *Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.

Akuntabilitas Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, penyajian akuntabilitas kinerja ini dilakukan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Pada Tahun 2025, pengukuran kinerja dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada awal tahun serta Perjanjian Kinerja Perubahan mengacu pada dokumen perjanjian kinerja, kinerja organisasi diukur melalui indikator kinerja pada Biro Perekonomian yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 2 (Dua) indikator target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pencapaian Kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

A. Membandingkan Antara Target dan Realisasi kinerja Tahun ini

Tabel 3.1.a

Tabel Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas tata kelola kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan	55	57	96,46%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85,005	100%

Berdasarkan hasil Tabel diatas menggambarkan bahwa Indeks Kualitas Kebijakan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 adalah nilai indeks 57 dan capaian 96,48% dimana target pada renstra adalah nilai indeks 55 dengan demikian target kualitas tata kelola kebijakan perekonomian memiliki nilai lebih tinggi dari target yang ada direnstra dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 mengalami peningkatan 2,005 poin dibandingkan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2024. Pada Tahun 2025, Biro Perekonomian meraih nilai 85,005 sedangkan pada tahun 2024 memperoleh nilai 83,73.

B. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian kinerja Tahun ini dengan tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir:

Tabel 3.1.b

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisas	% Capaian	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas tata kelola kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Ekonomi	0	0	0	65	0	0	55	57	103,64
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepuasan Masyarakat di Biro Perekonomian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74	80,33	108,55	80	83,73	104,66	85	85,005	100.01

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja indeks kualitas kebijakan bidang perekonomian tahun 2025 adalah 57 dengan target 55 dan capaian sebesar 103,64 % dan untuk realiasi kinerja tahun sebelumnya belum ada data realisasi untuk tahun 2023 dan Tahun 2024 dikarenakan karena masih Indikator Kinerja Baru di Biro Perekonomian , Indikator Indeks kualitas kebijakan (IKK) yang ada di tahun 2025 merupakan hasil rumusan dari program bapak Gubernur yang baru periode 2025-2029.

Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Perekonomian dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2023 sebesar 80,33 dan untuk tahun 2024 sebesar 83,73 Untuk pencapaian tahun 2025 sebesar 85,00 sehingga dari tahun 2024 ke tahun 2025 mengalami peningkatan 2,73 Poin.

C. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi:

Tabel 3.1.c

Tabel Perbandingan Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah di Renstra

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	Realisasi Target		
	Realisasi 2025	Target akhir renstra 2026	Tingkat Kemajuan
Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Ekonomi	57	58	1,73
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepuasan Masyarakat di Biro Perekonomian	85,005	87	2,3

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra 2026, terdapat beberapa hal penting:

- Untuk Indeks Kualitas Kebijakan, realisasi tahun 2025 adalah 57 target akhir Renstra 2026 yang ditetapkan sebesar 58 dengan tingkat kemajuan sebesar 1,73%. Capaian yang sangat signifikan ini menunjukkan keseriusan dan konsistensi dalam upaya perbaikan kualitas kebijakan perekonomian di Provinsi Sulawesi Tengah.
- Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah, realisasi tahun 2025 sebesar 85,005 target akhir Renstra 2026 yang ditetapkan sebesar 87 dengan tingkat kemajuan 2,3 %. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik telah memberikan dampak positif terhadap kepuasan masyarakat.

Capaian target Renstra ini membuktikan bahwa program-program pembinaan pelayanan publik yang dilakukan oleh Bagian Pelayanan Publik telah berjalan efektif. Pencapaian ini menjadi modal kuat untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Adapun hasil pencapaian target kinerja masing-masing sasaran strategis Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel Pengukuran Kinerja Tahunan (PKT) tahun 2025.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian	Nilai Kualitas Kebijakan bidang ekonomi	65
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Biro Perekonomian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83

Renstra 2021-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian	Nilai Kualitas Kebijakan bidang ekonomi	55
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Biro Perekonomian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85

Renstra 2025-2029

Berdasarkan hasil realisasi tabel Pengukuran Kinerja Tahunan (PKT) tersebut, maka prosentase tingkat capaian kinerja >80% berhasil dicapai. Ini menunjukkan hasil pencapaian kinerja berhasil dicapai sesuai dengan target yang ingin dicapai pada tahun 2025.

Berdasarkan dokumen Pengukuran Kinerja Tahunan (PKT) keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dalam pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang ditargetkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian dalam mendukung pencapaian kinerja tujuan organisasi .

Keberhasilan yang dicapai dari yang ditargetkan di dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 berdasarkan 2 (Dua) Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian yaitu :

1. Program Penunjang Pemerintah Yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Program Perekonomian dan Pembangunan

D. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (Jika ada)

Tabel 3.1.d

Tabel Perbandingan Capaian Dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota lain

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian
Meningkatnya Kualitas tata kelola kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Ekonomi	57	63 (LAN)	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepuasan Masyarakat di Biro Perekonomian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00	81,29	-

Berdasarkan tabel diatas standar nasional untuk indeks kualitas kebijakan bidang ekonomi sumber yang kami ambil dari Indeks Kualitas kebijakanyang dikembangkan oleh LAN RI dimana komponen penilaian IKK 2025 meliputi perencanaan 20%, implemetasi 25%, keberlanjutan 30%, Transparansi dan partisipasi publik 15% dengan standar nasional 63, karena IKK Ini merupakan indikator baru di Biro perekonomian dengan realisasi 57%, sehingga menjadi tantangan terbesar yang akan dihadapi adalah terkait dengan proses perencanaan, pengembangan, dan implementasi indikator tersebut. Keberhasilan atau kegagalan IKK dalam hal ini sangat bergantung pada sejauh mana biro perekonomian dapat mengembangkan indikator yang relevan, melibatkan berbagai stakeholder, dan mengelola sumber daya yang diperlukan untuk implementasi. Meskipun ada tantangan dalam mengimplementasikan indikator baru, dengan pendekatan yang sistematis, transparansi, serta koordinasi yang baik antar instansi, biro perekonomian bisa memastikan bahwa

kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga meningkatkan kualitas IKK secara keseluruhan.

Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat sendiri adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat. IKM ini sangat penting karena dapat memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat dan juga membantu pemerintah untuk mengevaluasi serta meningkatkan kualitas layanan yang ada. Berikut adalah perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan kota lain di Indonesia: Provinsi Sulawesi Selatan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kota Makassar, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Bantaeng menunjukkan nilai IKM sebesar 81,29, yang dikategorikan sebagai 'baik'. Hasil survei yang menunjukkan nilai IKM sebesar 81,29 merupakan indikator positif bahwa sistem di Provinsi Sulawesi Selatan sudah berjalan dengan baik. Meski begitu, evaluasi berkala tetap penting untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan bahwa masyarakat terus merasa puas dengan layanan yang diberikan. Untuk di Biro Perekonomian sendiri realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat lebih tinggi dibandingkan kota Makassar dimana IKM Biro Perekonomian setda Prov. Sulteng adalah sebesar 85,00.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

A. Indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan pada indikator ini adalah melihat isi kebijakannya, rumusan dan penyusunan guna mendukung pencapaian kualitas kebijakan daerah :

- Keberhasilan :

- a. Terdapat pelibatan OPD teknis dan instansi vertikal dalam pembahasan kebijakan
- b. Target penyelesaian fasilitasi kebijakan perekonomian tercapai sesuai waktu yang ditetapkan
- c. Dari sisi standar dan proses organisasi pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tergolong efektif, sehingga struktur dan proses organisasi yang ada mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan eksternal organisasi.

- d. Adanya kerjasama yang solid dalam melaksanakan komunikasi dan kolaborasi tim dalam memperbaiki strategi dan proses kerja.
- **Kegagalan :**
 - a. Perubahan regulasi pusat yang dinamis memerlukan penyesuaian yang berulang terhadap rancangan kebijakan daerah dalam mengambil kebijakan
 - b. Keterbatasan anggaran Koordinasi
 - c. Kompetensi sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan.

Hambatan/permasalahan dalam pencapaian Indeks Kualitas kebijakan Perekonomian antara lain:

1. **Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.**
Banyak OPD yang menghadapi keterbatasan dalam hal kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini menghambat implementasi kebijakan yang efektif.
2. **Keterbatasan Anggaran Koordinasi**
Pembiayaan yang tidak memadai menjadi salah satu kendala dalam pengembangan dan peningkatan kinerja OPD. Tanpa anggaran yang memadai, implementasi program-program yang mendukung menjadi terhambat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya upaya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kualitas SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi yang lebih optimal.

Upaya yang telah dilakukan oleh Biro Perekonomian untuk meningkatkan indeks kualitas kebijakan sebagai berikut:

1. **Penyusunan Standar Layanan Kebijakan Perekonomian**
Biro Perekonomian telah menyusun standar layanan yang jelas dan terstruktur terkait dalam pelaksanaan program kebijakan perekonomian sehingga dapat berjalan dengan lebih efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2. **Penguatan Pengawasan dan Monitoring**
Biro Perekonomian meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan Kebijakan perekonomian dan pembangunan.

3. Koordinasi dan Kolaborasi antar Instansi

Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara Biro Perekonomian dengan berbagai instansi terkait

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya upaya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kualitas SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi yang lebih optimal.

B. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah

Keberhasilan indikator kepuasan masyarakat biasanya diukur untuk menilai sejauh mana pelayanan publik atau program pemerintah memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

Beberapa indikator keberhasilan kepuasan masyarakat :

- a. Terpenuhinya pemenuhan informasi mengenai proses aduan Masyarakat.
- b. Adanya pemenuhan pendampingan dalam proses sampai dengan selesai pelaksanaan aduan Masyarakat.
- c. Dalam memberikan pelayanan ke Masyarakat telah memiliki standar pelayanan yang cepat dan proses yang efisien

Selain faktor pendorong keberhasilan terdapat beberapa hal juga yang menjadi kendala/hambatan antara lain :

- a. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai
- b. Pengisian Kuisioner Survey Kepuasan Masyarakat belum efektif dan tidak menyeluruh ke semua bagian Pelayanan Pada Biro Perekonomian.
- c. Kurangnya pengetahuan responden terhadap pentingnya pengisian Survey Kepuasan Masyarakat sehingga hasil kuisioner kurang objektif.

Upaya yang telah dilakukan oleh Biro Perekonomian untuk meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Perekonomian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Pembagian kuisioner dilakukan secara merata kesemua bagian pelayanan dengan menunjuk 1 koordinator untuk mengawasi dan mengumpulkan kuisioner

F. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya:**Tabel 3.1.f****Tabel Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja				Indikator Kinerja			Tingkat Efisiensi
	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target	REALISASI	% Capaian	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi
1	2	3	4	5	3	4	5	5
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Biro Perekonomian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 Dokumen	1 Dokumen	100	28.830.000	27.190.130	94,31	5,69
	Jumlah dokumen bimtek implementasi peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	28.830.000	27.190.130	94,31	5,69
	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100	230.423.300	230.423.300	100,00	-
	Jumlah dokumen penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	230.423.300	230.423.300	100,00	-
	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	14 Paket	14 Paket	100	755.146.550	750.465.146	99,38	0,62
	Jumlah Jasa pelaksanaan peralatan dan perlengkapan	14 Paket	14 Paket	100	755.146.550	750.465.146	99,38	0,62
Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan strategi penanganan inflasi	Jumlah laporan hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian	2 Dokumen	2 Dokumen	100	332.217.100	320.499.220	96,47	3,53
	Jumlah Laporan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	100	195.813.350	185.570.617	94,77	5,23
Meningkatnya kualitas inklusi keuangan	Jumlah Laporan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Dokumen	1 Dokumen	100	136.403.750	134.928.603	98,92	1,08
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Sumberdaya alam	Jumlah dokumen hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi Sumberdaya alam	3 Dokumen	3 Dokumen	100	335.164.800	331.280.067	98,84	1,16
	Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	112.175.100	108.660.317	96,87	3,13
	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	100	134.730.050	134.730.050	100,00	-
	Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100	88.259.650	87.889.700	99,58	0,42

	Kebijakan Energi dan Air							
Meningkatnya kemampuan BUMD untuk menghasilkan laba bersih	Jumlah laporan hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD	3 Dokumen	3 Dokumen	100	777.003.500	741.801.873	95,47	4,53
	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Dokumen	1 Dokumen	100	583.158.850	555.077.084	95,18	4,82
	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100	99.636.000	95.882.240	96,23	3,77
	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100	94.208.650	90.842.549	96,43	3,57

G. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.1.g Analisis Program/kegiatan Yang menunjang keberhasilan atau Kegagalan pencapaian pernyataan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	3	4	3	4	5	5
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dokumen	1 Dokumen	28.830.000	1 Dokumen	27.190.130	100,00	94,31
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah dokumen bimtek implementasi peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	1 Dokumen	28.830.000	1 Dokumen	27.190.130	100,00	94,31
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	Dokumen	1 Dokumen	230.423.300	1 Dokumen	230.423.300	100,00	100,00

Laporan Kinerja (LKj) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dokumen	1 Dokumen	230.423.300	1 Dokumen	230.423.300	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Paket	3 Paket	755.146.550	14 Paket	750.465.146	100,00	99,38
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa pelaksanaan peralatan dan perlengkapan	Paket	3 Paket	755.146.550	14 Paket	750.465.146	100,00	99,38
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian	Dokumen	2 Dokumen	332.217.100	2 Dokumen	320.499.220	100,00	96,47
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Laporan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	1 Dokumen	195.813.350	1 Dokumen	185.570.617	100,00	94,77
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Laporan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	1 Dokumen	136.403.750	1 Dokumen	134.928.603	100,00	98,92
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi Sumberdaya alam	Dokumen	3 Dokumen	335.164.800	3 Dokumen	331.280.067	100,00	98,84
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Dokumen	1 Dokumen	112.175.100	1 Dokumen	108.660.317	100,00	96,87
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	1 Dokumen	134.730.050	1 Dokumen	134.730.050	100,00	100,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen	1 Dokumen	88.259.650	1 Dokumen	87.889.700	100,00	99,58
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah laporan hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD	Dokumen	3 Dokumen	777.003.500	3 Dokumen	741.801.873	100,00	95,47
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	1 Dokumen	583.158.850	1 Dokumen	555.077.084	100,00	95,18
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Dokumen	1 Dokumen	99.636.000	1 Dokumen	95.882.240	100,00	96,23

Laporan Kinerja (LKj) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Dokumen	1 Dokumen	94.208.650	1 Dokumen	90.842.549	100,00	96,43
---	---	---------	-----------	------------	-----------	------------	--------	--------------

Program Penunjang Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	3	4	3	4	5	5
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dokumen	1 Dokumen	28.830.000	1 Dokumen	27.190.130	100,00	94,31
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah dokumen bimtek implementasi peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	1 Dokumen	28.830.000	1 Dokumen	27.190.130	100,00	94,31
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	Dokumen	1 Dokumen	230.423.300	1 Dokumen	230.423.300	100,00	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dokumen	1 Dokumen	230.423.300	1 Dokumen	230.423.300	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Paket	3 Paket	755.146.550	14 Paket	750.465.146	100,00	99,38
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa pelaksanaan peralatan dan perlengkapan	Paket	3 Paket	755.146.550	14 Paket	750.465.146	100,00	99,38

Program Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	3	4	3	4	5	5
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dokumen	1 Dokumen	28.830.000	1 Dokumen	27.190.130	<i>100,00</i>	94,31
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian	Dokumen	2 Dokumen	332.217.100	2 Dokumen	320.499.220	<i>100,00</i>	96,47
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Laporan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	1 Dokumen	195.813.350	1 Dokumen	185.570.617	<i>100,00</i>	94,77
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Laporan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	1 Dokumen	136.403.750	1 Dokumen	134.928.603	<i>100,00</i>	98,92
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi Sumberdaya alam	Dokumen	3 Dokumen	335.164.800	3 Dokumen	331.280.067	<i>100,00</i>	98,84
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Dokumen	1 Dokumen	112.175.100	1 Dokumen	108.660.317	<i>100,00</i>	96,87
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	1 Dokumen	134.730.050	1 Dokumen	134.730.050	<i>100,00</i>	100,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen	1 Dokumen	88.259.650	1 Dokumen	87.889.700	<i>100,00</i>	99,58
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah laporan hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD	Dokumen	3 Dokumen	777.003.500	3 Dokumen	741.801.873	<i>100,00</i>	95,47
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	1 Dokumen	583.158.850	1 Dokumen	555.077.084	<i>100,00</i>	95,18

Laporan Kinerja (LKj) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Dokumen	1 Dokumen	99.636.000	1 Dokumen	95.882.240	100,00	96,23
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Dokumen	1 Dokumen	94.208.650	1 Dokumen	90.842.549	100,00	96,43

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada, pagu anggaran Biro Perekonomian tahun 2025 sebesar Rp. 2,458.785.250- realisasi anggaran atas pencapaian dari indikator program pada tahun 2025 sebesar Rp. 2.401,659,738,- (97,68%).

Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 memaparkan capaian kinerja dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan. Anggaran tersebut bersumber dari 100% APBD Provinsi Sulawesi Tengah dengan komposisi penggunaan sebagai berikut :

Tabel 3.2
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Persentase (%)
1	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	1.014.399.850	1.008.078.576	99,38
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.830.000	27.190.130	94,31
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	28.830.000	27.190.130	94,31
Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.423.300	230.423.300	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.423.300	230.423.300	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	755.146.550	750.465.146	99,38
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	755.146.550	750.465.146	99,38
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.444.385.400	1.393.581.160	96,48
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	332.217.100	320.499.220	96,47
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	195.813.350	185.570.617	94,77
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	136.403.750	134.928.603	98,92
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	335.164.800	331.280.067	98,84
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	112.175.100	108.660.317	96,87
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	134.730.050	134.730.050	100,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	88.259.650	87.889.700	99,58
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	777.003.500	741.801.873	95,47

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	583.158.850	555.077.084	95,18
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	99.636.000	95.882.240	96,23
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	94.208.650	90.842.549	96,43
TOTAL	2.458.785.250	2.401.659.736	97,68

Dari tabel 3.2 dapat dilihat bahwa total anggaran Biro Perekonomian tahun 2025 sebesar Rp. 2,458.785.250- realisasi anggaran atas pencapaian dari indikator program pada tahun 2025 sebesar Rp. 2.401,659,738,- dengan persentase (97,68%), hal ini dapat tercapai disebabkan oleh adanya komitmen bersama, kerja sama dalam peningkatan SDM pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah guna menunjang keberhasilan Program dan Kegiatan.

3.3 Inovasi

Dalam rentang tahun 2025 Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan inovasi uji coba pengarsipan dokumen kepegawaian secara digital melalui sistem pelayanan pengarsipan dokumen kepegawaian berbasis digital di lingkup Biro Perekonomian, namun masih tahap uji coba, karena keterbatasan anggaran sehingga belum dapat diaplikasikan ditahun ini.

3.4 Penghargaan

Pada tahun 2025 Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Sekretariat Komite Daerah dan Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) mendapatkan penghargaan dari Anugerah Adinata Syariah yaitu juara 3 Kategori sekolah pelopor dalam ekonomi syariah yang diperuntukan untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 sebagaimana dokumentasi terlampir dibawah ini.



BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Target indikator kinerja Biro Perekonomian pada tahun 2025 dapat dicapai dengan baik, telah dilaksanakan 2 (dua) program untuk mencapai sasaran strategis, dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang ada dengan capaian kinerja sasaran strategis sebesar 97,68 persen, dimana pagu anggaran Biro Perekonomian tahun 2025 sebesar Rp. 2,458.785.250-, dengan realisasi anggaran atas pencapaian dari indikator program pada tahun 2025 sebesar Rp. 2.401,659,738,- (97,68%).
2. Untuk meningkatkan kinerja ke depan Biro Perekonomian, beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain :
 - Peningkatan Kapasitas SDM serta melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja.
 - Digitalisasi dan Pemanfaatan Teknologi.
 - Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Antar Instansi dll.

Demikian kami berharap kiranya Laporan Kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan di masa mendatang.

Palu, 02 Januari 2026
Kepala Biro Perekonomian
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,



YUNARTO PASMAN, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip : 19720614 200312 1 009

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUNIARTO PASMAN, SH

Jabatan : KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dra. NOVALINA, MM

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

Dra. NOVALINA, MM
NIP. 19690927 198811 2 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO PEREKONOMIAN,

YUNIARTO PASMAN, SH
NIP. 19720614 200312 1 009

PERJANJIAN KINERJA
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas kebijakan strategis penanganan inflasi	Sub Komponen Strategis Pelaksanaan RB Tematik Inflasi	100%
2	Meningkatnya Return On Aset (ROA) BUMD	(Return On Aset (ROA) BUMD)	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Biro Perekonomian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90

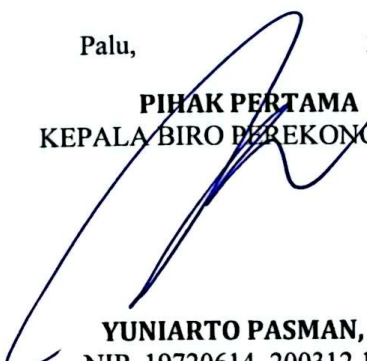
No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.200.028.400
2.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp. 1.609.971.400
JUMLAH		Rp. 2.809.999.800

Palu, 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH


DRI NOVALINA, MM
 NIP. 19690927 198811 2 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO PEREKONOMIAN,


YUNIARTO PASMAN, SH
 NIP. 19720614 200312 1 009



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUNIARTO PASMAN, SH
Jabatan : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dra. NOVALINA, MM
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

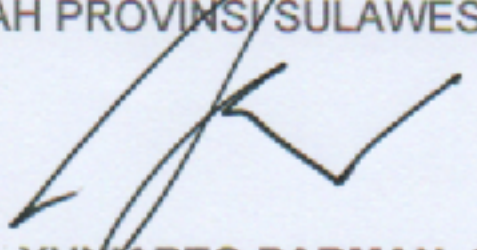
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH


Dra. NOVALINA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19690927 198811 2 001

Pihak Pertama,
KEPALA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH


YUNIARTO PARMAN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19720614 200312 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas kebijakan Perekonomian	Indeks Kualitas Kebijakan Perekonomian	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Biro Perekonomian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85

PROGRAM

ANGGARAN

KET

Biro Perekonomian

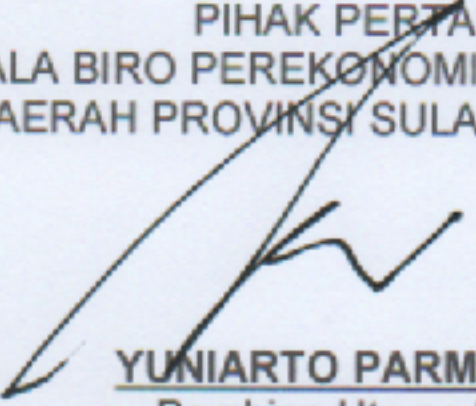
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 821.834.900	APBD
2	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp. 814.424.600	APBD
	Jumlah	Rp. 1.636.259.500	

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA,
 SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dra. NOVALINA, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19690927 198811 2 001

PIHAK PERTAMA,
 KEPALA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT
 DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH


YUNIARTO PARMAN, SH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720614 200312 1 009